

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN KASUS *STUNTING* DI KOTA SAMARINDA

Achmad Furqan Septianto, Dyah Lituhayu, Endang Larasati Setianingsih
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Stunting is a serious public health problem, especially in children under five, which can have an impact on physical growth and suboptimal cognitive development. The city of Samarinda faces serious challenges related to the high stunting rate, requiring an effective policy response from the local government. This study aims to analyze the implementation of the policy to reduce stunting cases carried out by the Samarinda City Health Office. In an effort to reduce stunting in Samarinda City, the Government issued a regulation through Mayor Regulation No. 102 of 2021 concerning Stunting Reduction in Semarang City and became a guideline in this study. The purpose of this study is to analyze the process of policy implementation and the driving and inhibiting factors for the reduction of stunting in Samarinda City. This research uses a descriptive – qualitative method with data collection through observation, interviews, and documentation. The Samarinda City Health Office has been done well, by holding a program to increase nutritional awareness and understanding of the importance of balanced food consumption patterns, making several programs to reduce the Stunting Prevalence rate in Samarinda City such as GERMAS (Healthy Community Movement), ISIPIRINGKU, and then there is for adolescents, namely Nutrition Action. resources, disposition and bureaucratic structure. Researchers suggest to improve Holding periodic training for health workers and policy implementers, Equipping health centers and posyandu with adequate and modern health equipment to support better health services.

Keywords: *Policy Implementation, Stunting, Samarinda City*

PENDAHULUAN

Stunting adalah kondisi yang terjadi ketika pertumbuhan fisik anak di bawah usia 2 tahun terhambat, berdasarkan standar deviasi dari WHO (*World Health Organization*). Secara umum, stunting lebih sering terjadi pada anak usia 12-16 bulan. Pada anak di bawah usia 5 tahun, *stunting* biasanya tidak mudah terlihat

karena perbedaannya dengan anak lain tidak terlalu mencolok. Usia di bawah 5 tahun adalah periode penting untuk menentukan potensi anak, yang bisa dilihat dari perkembangan fisik, pertumbuhan tubuh, dan kecerdasan mereka.

Banyak faktor yang bisa menyebabkan meningkatkan angka kejadian *Stunting* pada anak. Penyebab

utamanya adalah minimnya asupan makanan atau nutrisi dan penyakit infeksi. Faktor lain yang juga bisa menyebabkan *Stunting* adalah salah satunya pengetahuan ibu, kesalahan dalam mengasuh, *hygiene* yang buruk serta rendahnya peayanan kesehatan setempat. Faktor faktor lainnya yang bisa saja mempengaruhi adalah postur tubuh orang tua, jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang usia nya masyarakat yang belum tersadar akan pentingnya gizi selama kehamilan yang akan berpengaruh pada pertumbuhan janin.

Berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2017 tentang, gerakan Nasional Perbaikan gizi dan Permenkes Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi dan gerakan Nasional percepatan perbaikan gizi dengan target Nasional Penurunan *Stunting* menjadi 14% pada 2024, namun pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2023 masih mencapai realisasi penurunan angka *Stunting* sebesar 24,4% Selanjutnya pada temuan peneliti mengenai tentang data prevalensi Kota Samarinda menurut data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) 2019-2023 ternyata bahwa kenaikan prevalensi angka *Stunting* di Kota Samarinda signifikan.

Lebih lanjut, pemerintah Kota Samarinda mempunyai komitmen dalam rangka menurunkan angka *Stunting* di Kota Samarinda. Hal tersebut diwujudkan dalam regulasi peraturan Walikota Samarinda

Nomor 102 Tahun 2021 tentang penurunan *Stunting* di Kota Samarinda. Pada Pasal 3 Penurunan *Stunting* dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui: *Pertama* perbaikan pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi. *Kedua* peningkatan akses pangan dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi dan *Ketiga* peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Kemudian pada sasaran tercantum pada Pasal 6 *Pertama* Sasaran kegiatan penurunan *Stunting*, meliputi: *Pertama* intervensi gizi spesifik dan *Kedua* intervensi gizi sensitive *Kedua* Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: *Pertama* ibu hamil. *Kedua* ibu menyusui. *Ketiga* anak usia 0 – 59 bulan. *Keempat* Remaja Putri. *Keelima* Calon Pengantin.

Lebih lanjut data prevalensi *Stunting* pada tahun 2019-2023 di Kota Samarinda disajikan pada tabel berikut :

Angka Prevalensi *Stunting* Kota Samarinda tahun 2019-2023

No	Tahun	Presentase <i>Stunting</i>
1	2019	24,7 %
2	2020	24,7 %
3	2021	21,6 %
4	2022	25,3%
5	2023	24,4%

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda pada tahun 2023, pada tahun 2023, terdapat 1.430 balita di Kota Samarinda yang mengalami stunting. Dari jumlah tersebut, 555 balita termasuk dalam kategori sangat pendek, sedangkan 1380 balita masuk dalam kategori pendek.

Tabel Sebaran Balita Dengan Kategori Sangat Pendek dan Pendek Per Kecamatan di Kota Samarinda tahun 2023

N o	Kecamatan	Balita dengan status "sangat Pendek"	Balita dengan status "Pendek"
1	Loa Janan Ilir	54	172
2	Palaran	52	131
3	Samarinda Ilir	12	32
4	Samarinda Kota	12	31
5	Samarinda Seberang	61	134
6	Samarinda Ulu	56	305
7	Samarinda Utara	119	229
8	Sambutan	82	91
9	Sei Kunjang	80	170
10	Sungai Pinang	27	85

Berdasarkan pada tabel tersebut pada tahun 2023 data *Stunting* di Kecamatan Kota Samrinda menyatakan bahwa kondisi Balita dengan kategori sangat pendek dan pendek masih sangat tinggi. Dan terdapat 2 Kecamatan Tertinggi

dengan kategori Balita sangat pendek dan pendek, yaitu kecamatam Samarinda Ulu dan Samarinda Utara. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk lebih fokus melakukan Implmentasi Kebijakan terkait dengan penurunan angka *Stunting* dengan melakukan perbaikan Gizi. Berdasarkan Hal tersebut maka muncul pertanyaan penelitian "**Mengapa angka Prevalensi *Stunting* di Kota Samarinda masih sangat tinggi jauh diatas Standar Nasional sebesar 14%?**".

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kota Samarinda daam menangani *Stunting*?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penurunan *Stunting* di Kota Samarinda?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Menganalisis Implementasi Kebijakan Kota Samarinda dalam Menangani *Stunting*.
2. Untuk Menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Implementasi kebijakan pencegahan *Stunting* di Kota Samarinda.

KAJIAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Serangkaian langkah yang dikerjakan atau diabaikan oleh pejabat pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik berdasarkan kepentingan masyarakat. Keberhasilan kebijakan publik dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga tidak semua kebijakan mampu mencapai tujuannya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menjadi kebutuhan esensial untuk mendeteksi dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan di masa depan.

2. Implementasi Kebijakan

George C. Edward III memberikan pendapat terkait suatu model implementasi kebijakan publik dengan konsep Direct and indirect impact on implementation. Menurut pendapat George C. Edward III terdapat empat variabel yang sangat mempengaruhi dari keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

- a) Komunikasi
- b) Sumber Daya
- c) Disposisi
- d) Struktur Birokrasi

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengambilan data menggunakan wawancara dan observasi serta analisisnya dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan fenomena implementasi kebijakan penurunan

Stunting di Kota Samarinda. Situs penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Penurunan Kasus *Stunting* di Kota Samarinda

A. Perbaikan Pola Konsumsi Makanan dan Perilaku Sadar Gizi di Kota Samarinda

Peraturan Walikota Samarinda No 102 Tahun 2021 pasal 3 menyatakan bahwa tujuan penurunan *stunting* adalah untuk meningkatkan mutu gizi individu, keluarga, dan masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi. Ini menunjukkan komitmen kota Samarinda untuk mengatasi masalah gizi buruk dan *stunting* yang dapat berdampak serius pada kesehatan dan perkembangan anak-anak.

Implementasi kebijakan penurunan *stunting* ini juga harus disertai dengan monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan efektif dan dapat memberikan hasil yang diharapkan. Penggunaan data dan teknologi untuk melacak perkembangan dan dampak dari program-program ini akan sangat membantu dalam melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan.

1) Program Pemberian Makanan Tambahan

Program pemberian makanan tambahan (PMT) di Kota Samarinda merupakan inisiatif penting dalam upaya perbaikan gizi masyarakat, terutama bagi balita dan ibu hamil. Pada tanggal 1 Mei 2024, Samarinda memperoleh anggaran khusus untuk program PMT yang berbasis pangan lokal. Tujuan utama dari program ini adalah mengubah perilaku dan pola konsumsi masyarakat. Dengan program ini, masyarakat diajarkan secara langsung cara memasak dan menyiapkan makanan bergizi yang layak untuk balita dan ibu hamil. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya makanan sehat dan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Program-program khusus seperti GERMAS (Gerakan Masyarakat Sehat), ISIPIRINGKU, dan Aksi Bergizi juga berperan penting dalam upaya meningkatkan kesadaran gizi di Samarinda. GERMAS mempromosikan gaya hidup sehat secara umum, sementara ISIPIRINGKU fokus pada pengenalan porsi makanan seimbang. Aksi Bergizi ditujukan untuk anak remaja dengan kegiatan seperti senam dan edukasi tentang pola konsumsi sehat di sekolah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa kurang optimalnya pelaksanaan

pengecehan dan penanggulangan, tingkat pengetahuan masyarakat tentang pencegahan belum meningkat secara signifikan, serta tidak terjadi perubahan perilaku yang signifikan oleh masyarakat di dalam pemberian asupan gizi.

Dari hasil temuan lapangan, peneliti juga melihat adanya sikap antusias dan komitmen dari para anggota pelaksana kebijakan. Hal tersebut dibuktikan dengan salah satu program upaya penurunan *stunting* melalui PMT turut dilaksanakan setiap harinya dan diberikan langsung ke penerima bantuan. dan pada pengamatan dan temuan penelitian, peneliti juga mengamati adanya program ISIPIRINGKU di salah satu Puskesmas di Kota Samarinda yang di laksanakan oleh pemerintah dan dinas Kesehatan setempat. Yang dimana program ini ialah memberi makanan tambahan kepada anak balita dan ibu hamil. Program ini ialah memberi makanan 4 sehat 5 sempurna pada anak yang terkena *stunting* dan ibu hamil di Kota Samarinda. Yang terdiri dari sayur sayuran, protein, vitamin dan karbohidrat.

2) Peningkatan Persediaan Pangan Bergizi

Peningkatan persediaan pangan gizi di Kota Samarinda merupakan langkah strategis yang dirancang untuk mengatasi masalah *stunting*. Pemerintah kota memberikan dukungan langsung kepada petani dan peternak melalui penyediaan

bibit unggul, pupuk, dan pelatihan tentang teknik budidaya serta peternakan yang modern dan efisien. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil pertanian dan peternakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, diversifikasi tanaman pangan menjadi prioritas utama untuk memastikan tersedianya berbagai jenis makanan yang kaya nutrisi. Dengan mengembangkan berbagai jenis tanaman pangan, masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok, tetapi juga memiliki akses ke berbagai sumber nutrisi penting. Diversifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, serta mengurangi risiko stunting di kalangan anak-anak.

Untuk memperkuat akses pangan bergizi bagi semua lapisan masyarakat, berbagai program dan inisiatif telah diluncurkan. Salah satunya adalah kampanye konsumsi pangan lokal yang mendorong masyarakat untuk lebih memilih dan mengonsumsi produk pangan yang dihasilkan di daerah mereka sendiri. Kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung perekonomian lokal, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan pangan yang lebih stabil dan bergizi. Dengan mengonsumsi pangan lokal, masyarakat dapat menikmati makanan yang lebih segar dan bernutrisi, yang pada

akhirnya dapat membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Di samping itu, pemerintah Kota Samarinda juga mengimplementasikan program subsidi dan bantuan pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Program ini termasuk pemberian voucher atau potongan harga untuk bahan pangan pokok, serta penyediaan paket sembako yang berisi makanan bergizi. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dan memastikan bahwa mereka tetap memiliki akses ke makanan yang cukup dan bergizi. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan tidak ada lagi keluarga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Secara keseluruhan, kebijakan peningkatan persediaan pangan gizi di Kota Samarinda mencakup pendekatan yang holistik dan komprehensif. Dengan dukungan kepada petani dan peternak, diversifikasi tanaman pangan, kampanye konsumsi pangan lokal, serta program subsidi dan bantuan pangan, diharapkan angka stunting di kota ini dapat ditekan secara signifikan. Langkah-langkah strategis ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan gizi dan ketahanan pangan.

3) Kebijakan Peningkatan Pangan Gizi

Kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pangan bergizi di Kota Samarinda merupakan upaya yang mencakup berbagai inisiatif yang saling mendukung. Dengan pengembangan pasar pangan lokal, program subsidi, pemberdayaan pertanian, edukasi gizi, pengawasan regulasi, kerjasama lintas sektor, dan pembangunan infrastruktur, pemerintah bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung pola konsumsi makanan sehat. Dengan pendekatan komprehensif ini, tujuan utamanya adalah tidak hanya meningkatkan kesehatan individu, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jika dari Penelitian Terdahulu dengan topik Kebijakan penurunan Stunting, Penerapan manajemen Stunting hanya melibatkan dua lembaga terkait, yaitu Kantor Kesehatan dan Badan Perencanaan Daerah. Oleh karena itu, dalam menerapkan kebijakan di era pemerintahan yang baik saat ini, prinsip partisipasi sangat dibutuhkan. Ini sejalan dengan tiga pilar pemerintahan yang baik: pemerintah, swasta dan masyarakat. Tanpa partisipasi publik, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dilakukan secara optimal. (Dyah Lituhayu, Ida Hayu Dwimawanti 2022)

Melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kebijakan ini diharapkan dapat

meningkatkan persediaan pangan gizi dan akhirnya meningkatkan kualitas hidup serta kesehatan masyarakat di Kota Samarinda. Pentingnya kolaborasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan ini menjadi landasan utama untuk kesuksesannya. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Edukasi dan penyuluhan gizi masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, masalah sosial dan ekonomi juga menjadi kendala, seperti kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, yang sering kali berdampak pada tingginya angka stunting.

B. Peningkatan Akses Pangan dan Mutu Pelayanan Gizi

Peningkatan akses pangan dan mutu pelayanan gizi merupakan komponen kunci dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Kota Samarinda. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama anak-anak dan ibu hamil, memiliki akses yang memadai terhadap makanan bergizi yang esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Upaya ini melibatkan berbagai langkah strategis dan kolaboratif, serta berfokus pada peningkatan infrastruktur, edukasi gizi, dan pemantauan yang ketat.

Salah satu inisiatif utama dalam kebijakan ini adalah pengembangan pasar pangan lokal dan pemberdayaan pertanian. Dengan mendukung petani lokal melalui penyediaan bibit unggul, pupuk, dan pelatihan teknik budidaya modern, Kota Samarinda berupaya meningkatkan produksi pangan lokal yang berkualitas. Diversifikasi tanaman pangan juga menjadi prioritas untuk memastikan ketersediaan berbagai jenis makanan yang kaya nutrisi. Program subsidi dan bantuan pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah, seperti pemberian voucher atau potongan harga untuk bahan pangan pokok, serta paket sembako yang berisi makanan bergizi, juga diimplementasikan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses pangan yang sehat.

1) Penyediaan Pangan Bergizi di Daerah Rawan

Kota Samarinda telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk mengatasi kerawanan pangan dan memastikan aksesibilitas pangan bergizi di seluruh wilayah, termasuk daerah rawan pangan. Salah satu langkah yang diambil adalah pemetaan wilayah yang mengalami kesulitan pangan. Dewan Ketahanan Pangan Kota Samarinda, yang terdiri dari pakar-pakar dan tim percepatan penurunan stunting, telah mengidentifikasi daerah-daerah yang paling membutuhkan intervensi. Pemetaan

bentuk fokus pemerintah pada wilayah yang paling rawan dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan dengan efektif. Dengan adanya peta kerawanan pangan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi krisis pangan sebelum menjadi lebih parah.

Pemerintah Kota Samarinda telah berupaya memperbaiki jalan dan infrastruktur lainnya untuk mendukung distribusi pangan yang efisien. Ini sejalan dengan upaya untuk mengembangkan pasar lokal dan memperkuat perekonomian setempat. Selain itu, kebijakan peningkatan akses pangan di Kota Samarinda juga mencakup berbagai inisiatif lain seperti program subsidi dan pemberdayaan pertanian. Melalui program subsidi, pemerintah memberikan dukungan finansial untuk bahan pangan pokok sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Pemberdayaan pertanian, yang melibatkan penyediaan bibit unggul, pupuk, dan pelatihan teknik budidaya modern, bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal yang berkualitas dan beragam. Ini tidak hanya membantu petani lokal tetapi juga memastikan ketersediaan pangan bergizi yang stabil bagi masyarakat

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Gizi

Kota Samarinda menempatkan prioritas tinggi pada peningkatan kualitas layanan gizi melalui program pelatihan dan pendidikan yang komprehensif bagi tenaga kesehatan. Pelatihan ini tidak hanya diadakan secara rutin setiap tahun untuk tenaga kesehatan baru, tetapi juga dirancang untuk memastikan bahwa semua anggota tim kesehatan, terutama mereka yang bekerja di bidang gizi, memiliki pemahaman yang kuat tentang penilaian status gizi, gizi seimbang, dan strategi intervensi gizi.

Salah satu poin penting yang diungkapkan dalam wawancara adalah pentingnya kerja sama antarprofesi dalam tim kesehatan. Pelatihan ini tidak hanya ditujukan kepada ahli gizi tetapi juga mencakup dokter dan perawat. Hal ini menunjukkan pendekatan terpadu yang mengharuskan semua anggota tim kesehatan bekerja sama dalam memantau dan menangani kasus stunting. Pendekatan ini menekankan bahwa ahli gizi tidak boleh bekerja secara terisolasi tetapi harus berkolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya untuk memberikan layanan yang lebih efektif dan komprehensif.

Kota Samarinda memastikan bahwa pelatihan dasar gizi diadakan setiap tahun, terutama bagi tenaga kesehatan baru. Ini mencakup pelatihan mengenai pemahaman mendasar tentang gizi seimbang, penilaian

status gizi, dan strategi intervensi yang disesuaikan dengan berbagai kelompok usia, termasuk ibu hamil, bayi, dan balita. Pendidikan berkelanjutan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga standar tinggi dalam layanan kesehatan dan gizi, serta untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki keterampilan terbaru dan pengetahuan yang relevan.

C. Peningkatan Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi

Kota Samarinda saat ini tengah menerapkan kebijakan peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan banyak pihak. Pendekatan ini menunjukkan adanya kesadaran tinggi dari pemerintah daerah terhadap pentingnya keamanan pangan dan kualitas gizi bagi masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kebijakan ini diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif.

1) Penguatan Sistem Kebijakan Pemantauan dan Pencatatan pangan dan Gizi

Kebijakan ini mencakup pengembangan sistem informasi pangan yang terintegrasi, yang dirancang untuk memantau ketersediaan, distribusi, dan kualitas pangan di seluruh wilayah Kota Samarinda. Sistem informasi ini

memungkinkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan data real-time terkait status pangan dan gizi, yang merupakan langkah maju dalam upaya mempercepat respons terhadap permasalahan pangan. Adanya data real-time juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti.

Kebijakan kewaspadaan pangan di Samarinda juga mengedepankan pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi mobile dan platform berbasis web digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara cepat. Teknologi ini mempermudah pemangku kepentingan dalam memantau kondisi pangan dan gizi serta memungkinkan adanya laporan langsung dari masyarakat. Hal ini menunjukkan adaptasi Samarinda terhadap era digital dan teknologi informasi dalam memperkuat sistem pengawasan pangan.

Selain pendekatan top-down dari pemerintah, kebijakan ini juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemantauan pangan dan gizi. Program-program komunitas dirancang untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan bersama. Masyarakat diberikan kesempatan untuk melaporkan temuan pangan yang mencurigakan, sehingga tercipta sistem pengawasan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan

tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kualitas pangan yang mereka konsumsi.

2) Penyuluhan Gizi dan Kesehatan

Penyuluhan gizi dan kesehatan di Kota Samarinda dilakukan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat. Inisiatif ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Masalah gizi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada balita jika mereka mengonsumsi zat gizi yang kurang selama periode ini (Nadirawati et al., 2023). Tidak perlu banyak uang untuk mendapatkan asupan makanan yang sehat. Bahan pangan lokal yang kaya nutrisi membantu penurunan stunting pada balita.

Di setiap Posyandu dan Puskesmas, penyuluhan rutin diadakan dengan fokus pada kelompok-kelompok yang paling rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sesi penyuluhan ini mencakup berbagai topik penting seperti pentingnya asupan gizi seimbang, cara memasak yang sehat, dan pentingnya pemberian ASI eksklusif. Dengan penekanan pada edukasi praktis, sesi ini juga mengajarkan masyarakat tentang cara mengenali tanda-tanda stunting dan langkah-langkah

pencegahannya. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan peran penting gizi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka.

Kader kesehatan memainkan peran kunci dalam upaya penyuluhan ini. Mereka telah dilatih khusus untuk memberikan informasi dan pendampingan kepada masyarakat, memastikan bahwa pesan-pesan penting tentang gizi dan kesehatan dapat tersebar luas. Kader-kader ini berfungsi sebagai jembatan antara layanan kesehatan formal dan masyarakat, memberikan bantuan praktis kepada keluarga yang membutuhkan. Mereka tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendukung secara langsung dengan mengajarkan cara memasak makanan sehat dan memberikan contoh menu sehari-hari yang bergizi.

Selain itu, keterlibatan kader kesehatan dalam penyuluhan memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan konteks budaya masyarakat. Kader-kader ini juga membantu dalam mengidentifikasi dan mendukung keluarga yang berisiko tinggi mengalami masalah gizi, termasuk stunting. Dengan pendekatan yang personal dan terfokus, penyuluhan gizi dan kesehatan menjadi lebih efektif dan berdampak.

2. Faktor Penghambat dan Pendorong Implementasi Kebijakan Penurunan Kasus *Stunting* di Kota Samarinda

1) Komunikasi

Menurut George C. Edward III memberikan pendapat terkait suatu model implementasi kebijakan publik dengan konsep Direct and indirect impact on implementation. Menurut pendapat George C. Edward III terdapat empat variabel yang sangat mempengaruhi dari keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Agustino,2014), yaitu: Komunikasi memiliki peran yang cukup penting dalam keberhasilan implementasi. Komunikasi yang lemah akan menghambat proses implementasi itu sendiri. Intensitas mengomunikasikan kebijakan publik dalam implementasi dibutuhkan agar komitmen dan dukungan pihak-pihak terkait dapat terbentuk dan menunjang keberhasilan implementasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi berjalan efektif apabila komunikasi terjalin dengan baik dan tersampaikan. Komunikasi ini bertujuan untuk mendapatkan kesepahaman antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Komunikasi dalam kebijakan penurunan kasus Stunting di Kota Samarinda menjadi salah satu kunci untuk tercapainya atau berhasilnya tujuan kebijakan ini. Dinas

Kesehatan merupakan instansi yang memiliki peran penting dalam kebijakan penurunan Stunting di Kota Samarinda. Dinas Kesehatan melakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat yang ada di Kota Samarinda. Komunikasi antara tim tenaga kesehatan dan kepada masyarakat ialah dengan memberikan penjelasan terkait peraturan walikota no 102 tahun 2021 tentang penurunan Stunting yang ada di Kota Samarinda.

Komunikasi merupakan elemen krusial dalam upaya implementasi kebijakan penurunan kasus stunting di Kota Samarinda. Untuk memastikan keberhasilan program ini, Dinas Kesehatan menggunakan berbagai metode komunikasi yang mencakup media tradisional, media sosial, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Langkah-langkah ini dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memastikan bahwa informasi yang diberikan tepat sasaran dan mudah dipahami.

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui media massa seperti radio dan media cetak. Melalui siaran radio, kampanye informasi mengenai pentingnya gizi seimbang dan cara mencegah stunting dapat disampaikan secara luas dan efektif. Media cetak juga digunakan untuk menjangkau masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses mudah ke teknologi

digital. Selain itu, media sosial seperti Instagram digunakan untuk menyebarkan informasi dengan cara yang menarik dan interaktif, terutama bagi generasi muda yang lebih sering mengakses platform ini..

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan sabagai faktor keberhasilan dan efektivitas dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang memadai dapat memudahkan implementasi kebijakan berjalan dengan optimal. Pada penurunan Stunting di Kota Samarinda yang dimaksud yaitu meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan anggaran.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di Kota Samarinda, berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka stunting dengan melibatkan banyak pihak dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Berdasarkan informasi yang tersedia, upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas program di 26 Puskesmas yang ada. Setiap Puskesmas memiliki petugas promosi kesehatan (promkes) yang mendukung berbagai program, termasuk program gizi. Petugas promkes berfokus pada upaya promosi kesehatan, sementara petugas gizi di Puskesmas bertanggung jawab pada pemantauan dan intervensi langsung terkait status gizi masyarakat, terutama ibu hamil dan anak-anak. Selain itu, Puskesmas di Kota Samarinda

dilengkapi dengan alat-alat medis dasar yang diperlukan untuk pemantauan kesehatan, seperti alat pengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak. Keberadaan laboratorium gizi di beberapa Puskesmas memungkinkan analisis yang lebih mendalam terkait status gizi anak, yang merupakan komponen penting dalam program penurunan stunting. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan penyuluhan di lapangan, Puskesmas juga didukung oleh kendaraan operasional yang memadai.

Pemerintah Kota Samarinda juga memberdayakan kader posyandu dan penyuluh kesehatan yang menjadi ujung tombak dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat. Mereka dilatih secara berkala untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan informasi dan pendampingan kepada masyarakat. Pelatihan dan rekrutmen tenaga kesehatan terus ditingkatkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih khusus di bidang gizi.

Meskipun fasilitas yang ada di Puskesmas cukup memadai, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa Puskesmas membutuhkan renovasi dan perbaikan alat-alat medis untuk meningkatkan kualitas layanan. Di daerah terpencil, ketersediaan fasilitas kadang masih kurang optimal. Oleh karena

itu, Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk terus meningkatkan pelatihan dan rekrutmen tenaga kesehatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dukungan anggaran yang memadai juga menjadi faktor penting dalam upaya ini. Dengan total alokasi anggaran sekitar Rp 4 miliar untuk program penurunan stunting di tahun anggaran terbaru, Pemerintah Kota Samarinda berharap dapat melaksanakan berbagai program dan inisiatif yang efektif dalam menurunkan angka stunting. Pemerintah optimis bahwa dengan pemantauan dan evaluasi yang ketat, setiap rupiah yang dialokasikan akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan status gizi anak-anak di Kota Samarinda.

3) Disposisi

Karakteristik pelaksana dalam kebijakan sangat penting dan berpengaruh pada keberhasilan suatu kebijakan dalam pencapaian tujuannya. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini di karenakan dalam menjalankan tugasnya, aktor yang terlibat harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan penurunan Stunting ini sudah cukup baik dan sesuai dengan apa yang telah di amanatkan dalam peraturan daerah.

Dinas Kesehatan Kota Samarinda memainkan peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan penurunan stunting. Dinas ini bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai program dan inisiatif yang telah direncanakan untuk mencapai target penurunan angka stunting. Kerjasama lintas sektor menjadi kunci dalam upaya ini, termasuk kolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan edukasi gizi di sekolah, dan Dinas Pertanian untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi. Sinergi antar sektor ini memastikan bahwa upaya penurunan stunting tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja, tetapi juga melibatkan sektor-sektor lain yang relevan.

Dalam upayanya, Dinas Kesehatan Samarinda terus memperkuat kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Posyandu dilatih secara khusus untuk menangani kasus stunting dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani masalah stunting secara efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan hal yang berkaitan dengan suatu kendali atau kontrol dalam manajemen dan proses

pelaksanaan. Hal tersebut memengaruhi suatu kegiatan dalam sebuah organisasi atau perangkat yang dapat menunjukkan suatu pencapaian dan keberhasilan tujuan organisasi. Struktur birokrasi yang besar dengan jenjang hirarkis juga menjadi salah satu sebab terhambatnya suatu proses dalam menjalankan suatu tugas, khususnya dalam organisasi karena terdapat beberapa proses yang harus dilewati. Suatu struktur yang sederhana akan memungkinkan percepatan terhadap suatu pekerjaan. Akan tetapi, sebuah proses saja tidak menentukan hasil akhir. Proses tersebut sangat menuntut adanya koordinasi dan kerja sama oleh beberapa pihak untuk melaksanakan kebijakan yang begitu kompleks. Jika birokrasi tidak berjalan secara kondusif dan teratur maka akan mengakibatkan sumber daya yang ada tidak menjadi efisien dan efektif. Hal ini akan menghambat suatu proses dalam sebuah kebijakan. Oleh karena itu, birokrasi dalam pelaksana kebijakan dapat mendukung suatu kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan dengan melakukan komunikasi agar terjalin koordinasi yang baik.

Struktur birokrasi dalam upaya penurunan stunting di Kota Samarinda tampak sangat terorganisir dan sistematis, dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur sebagai panduan utama. SOP ini dirancang oleh Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi untuk

memastikan setiap langkah dalam penanganan stunting dilakukan dengan konsisten dan efektif. Adanya SOP ini menunjukkan komitmen terhadap standardisasi prosedur dan integritas pelaksanaan program, yang sangat penting dalam birokrasi kesehatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jabarkan , dapat diperoleh kesimpulan dari Implementasi Kebijakan Penurunan Kasus Stunting di Kota Samarinda. Pemerintah dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda memainkan peran kunci dalam memahami dan merespons kebutuhan masyarakatnya, dengan fokus pada ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bergizi serta peningkatan kualitas layanan gizi. Implementasi kebijakan ini mencakup pengembangan sistem informasi pangan terintegrasi dan penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi mobile dan platform web, untuk memantau status pangan secara real-time. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan pangan dan gizi juga didorong melalui program komunitas.

Untuk faktor penghambat dari implementasi kebijakan penurunan kasus *Stunting* di Kota Samarinda, yaitu Komunikasi yang terjadi antara pelaksana dengan masyarakat sasaran sepenuhnya belum berjalan dengan baik. Selain itu

untuk sarana dan prasarana masih banyak nya puskesmas dan posyandu yang belum memadai dan perlu di Renovasi, agar masyarakat aman dan nyaman saat kunjungan ke puskesmas dan posyandu yang ada di Kota Samarinda. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat membentuk generasi yang lebih unggul, cerdas, dan berkontribusi positif dalam pembangunan Kota Samarinda dan negara secara keseluruhan.

SARAN

1. Mengalokasikan anggaran untuk renovasi puskesmas dan posyandu yang sudah ada serta membangun fasilitas baru jika diperlukan. Pastikan fasilitas tersebut memenuhi standar kesehatan dan nyaman untuk masyarakat.
2. Melengkapi puskesmas dan posyandu dengan peralatan kesehatan yang memadai dan modern untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik.
3. Memastikan bahwa bahan pangan bergizi tersedia dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertimbangkan kemitraan dengan petani lokal dan penyedia pangan untuk meningkatkan ketersediaan makanan sehat.
4. Meningkatkan kualitas layanan gizi melalui evaluasi rutin dan penyesuaian kebijakan untuk memastikan bahwa

layanan yang diberikan sesuai dengan standar kesehatan dan gizi yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D.P., Utami, W., Sulastri, E. (2020). Pencegahan stunting melalui kegiatan penyuluhan gizi balita dan pemberian makanan tambahan berbasis kearifan lokal di posyandu desa Madureso. *Proceeding of The URECOL Hal.* 74–79.
- Dyah Lituhayu, Ida Hayu Dwimawanti, M. (2022). Analysis of Community's Role in Implementation of Stunting Policy in Pemalang District. *ICISPE 2021, September 2019.* <https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2021.2321365>
- Erllyn, P., Hidayat, B., Fatoni, A., & Saksono, H. (2021). Nutritional Interventions by Local Governments as an Effort to Accelerate Stunting Reduction. *Jurnal Bina Praja, 13*(3), 543–553. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.543-553>
- Fauziah, F., & Novandi, D. (2022). Aksi Pencegahan Kasus Stunting Di Kota Samarinda Melalui Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya). *Jurnal Riset Inossa, 3*(2), 76–86. <https://doi.org/10.54902/jri.v3i2.50>
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 3*(1), 11–21. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.214>
- Herawati, D. M. D., & Sunjaya, D. K. (2022). Implementation Outcomes of National Convergence Action Policy to Accelerate Stunting Prevention and Reduction at the Local Level in Indonesia: A Qualitative Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 19*(20). <https://doi.org/10.3390/ijerph192013591>
- Hutri Agustino, E. R. P. W. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting. *Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik, 8*(2), 241–252. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22558>
- Isro' Lailia, Kismartini, A. Z. R. (2021). Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review, Vol 10, No*(July), 1–23. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/31228>
- Kinanti, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic Education, 5*(3), 293–300. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.720>
- Miswan. (2022). Implementation Of Stunting Policy In Bandung. *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic), 1*(3), 104–114.
- Neka Indriyani, I., Ibrahim, & Sarpin. (2022). Implementation the policy of prevention and stunting management (Study of Regional Regulation Number 7 of 2021 Concerning Prevention and Stunting Management in South Bangka). *Social Science Studies, 2*(6), 487–509. <https://doi.org/10.47153/sss26.4772022>
- Prihatini, D., & Subanda, I. N. (2020).

- Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 1–14. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/353>
- Prihatin, P. S., & Wicaksono, A. (2022). Grindle Policy Implementation Theory in Analysis of Forestry Conflict In Pelalawan District, Riau Province. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 31–44. [https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7\(2\).9493](https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7(2).9493)
- Probohastuti, N. F., & Rengga, A. (2019). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Penurunan Stunting di Kabupaten Blora. *Jurnal Administrasi Publik FISIP UNDIP*, 1–16.
- Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). Study Guide - Stunting dan Upaya Pencegahannya. In *Buku stunting dan upaya pencegahannya*.
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>
- Rini, E. S. (1994). 80610-ID-pengaruh-gizi-terhadap-pertumbuhan-dan-p. *Cakrawala Pendidikan*, November, 139–153.
- Satriawan, E. (2018). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 (National Strategy for Accelerating Stunting Prevention 2018-2024). *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia*, November, 1–32. http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis_2018/Sesi1_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf
- Sudiman, H. (2018). *Stunting atau pendek_awal perubahan patologis atau adaptasi karena perubahan ekonomi.pdf*. Media Litba.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*.
- Zaleha, S., & Idris, H. (2022). Implementation of Stunting Program in Indonesia: a Narrative Review. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 10(1), 143–151. <https://doi.org/10.20473/jaki.v10i1.2022.143-151>